Tren Keberagamaan Masyarakat Indonesia Kontemporer:

Perspective Politik.[[1]](#footnote-1)

Jamhari Makruf

PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

1. Banyak orang bertanya, mengapa Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim (87%) tidak bisa membuat sebuah partai politik Islam yang besar?
2. Benarkah arah politik Islam di Indonesia cenderung menuju ke arah radikal Islam—Islam yang tidak toleran dan ramah terhadap perbedaan dan kemajemukan masyarakat?
3. Pertanyaan itu selalu muncul di kalangan umat Islam Indonesia yang memimpikan dan juga memperjuangkan hadirnya Partai Politik Islam yang besar di Indonesia. Di antara mereka bahkan mempejuangkan untuk mendirikan Khilafah Islam di Indonesia. Sudah banyak yang digagas dan dikerjakan, tetapi mengapa usaha untuk mewujudkan gagasan partai Islam dan negara Islam di Indonesia selalu gagal?
4. Saya mempunyai pendapat, bahwa mayoritas Muslim Indonesia tidak bermimpi untuk mendirikan partai politik Islam tunggal, dan umat Islam di Indonesia juga percaya bahwa ide mendirikan negara Islam di Indonesia bukanlah mimpi ideal. Hal itu karena kontek sosial dan politik Indonesia yang sangat berbeda dan bahkan bisa dikatakan tidak cocok untuk Indonesia.
5. Dari Pesta demokrasi yang relative bebas dari tekanan, sejak tahun 1955, 2004, 2009, dan 2014, perolehan partai politik Islam Indonesia tidak bisa din=bilang menggembrikan. Barangkali perolehan suara partai Masyumi, NU dan PSII tahun 1955, jika suara mereka digabung, adalah prestasi terbaik partai Islam. Masyumi mendapat 21%, NU 19% dan PSII 3%. Jika digabungkan ketiga partai Islam itu mencapai 43% suara. Peolehan partai berbasis Islam gabungan pada tahun 1999 sebesar 37,54, tahun 2004 memperoleh 38,33, pemilu 2009 prestasi terburuk partai berbasis Islam 29% dan pemilu 2014 naik kembali menjadi 32%. Pemilu zaman orde baru tidak dibahas, karena pemilihan yang dinilai kurang bebas. Dilihat dari prestasi partai politik berbasis Islam di pemilu nampaknya tidak perna menembus 50 persen, bahkan ada kecenderungan menurun.
6. Dari survey survey yang dilakukan PPIM sejak tahun 2001 sampai tahun 2007 juga menunjukkan tidak ada kaitan positif antara keberagamaan dengan pilihan parti politik berbasis Islam. Misalnya, dalam survey PPIM ditemukan bahwa tingkat kesalehan Umat Islam Indonesia sangat Tinggi (berapa mereka sering sholat lima waktu, melaksanakan puasa bulan Ramadhan, mempertimbangkan aspek agama dalam masalah sosial dan politik, dan lebih mempercayai ulama dari pada tokoh pemerintahan), tetapi tidak ada korelasi positif dengan pilihan partai politik.
7. Secara sosiologis pun bisa kita lihat bahwa kesadaran umat Islam untuk melaksanakan agamanya juga semakin tinggi. Fenomena Jilbab yang muncul saat ini bisa dilihat. Dulu Jilbab hanya dipakai dalam forum keagamaan saja, sekarang di ruang ruang public seperti mal, tempat rekreasi dan tempat olah raga juga terlihat. Munculnya pengajian dan sholat sholat berjamaah di perkantoran dan hotel di kota kota besar juga dpat dijadikan indikasi tumbuh kembangnya keagamaan umat Islam Indonesia. Kuliner halal, pariwisata halal, berduyun duyun berangkat umrah dll. Ada peningkatan keberagamaan umat Islam Indonesia.
8. Tapi mengapa partai Islam tidak dipilih? Bahkan pengamat politik Saiful Mujani pernah bilang, “Partai Islam mati di lautan Jilbab.”
9. Pembacaan yang Salah:
	1. Islam dimaknai oleh umat Islam Indonesia sebagai “Social Marker” bukan sebagai “Political Marker.” Menjadi Muslim tidak otomatis menjadi pengikut partai politik tertentu. Tidak mengherankan jika umat Islam Indonesia lebih aktif berdonasi di lembaga lembaga sosial dari pada berdonasi kepada partai politik.
	2. Kontek sosial Indonesia yang berbeda. Takdir Muslim Indonesia hidup di tengah tengah masyarakat yang sangat plural, baik dari segi agama dan juga etnis. Bukan hanya itu saja, umat Muslim Indonesia juga ditakdirkan untuk hidup dengan beragama sekte atau madzhab keislaman. Sehingga tidak mudah untuk menyatukan umat Islam ke dalam satu wadah, apalagi wadah partai politik.
	3. Karakter Umat Islam Indonesia yang hidup dalam kehidupan plural mengharuskan adanya pola pemahaman politik Islam yang juga berbeda. Pancasila sebagai jalan tengah politik Islam yang moderat. Umat Islam Indonesia menafsirkan Politik Islam lebih untuk memasukkan nilai dan pesan Islam ke dalam tatanan politik yang sudah ada (subtantiative approach) daripada normative formalistic Islam.
10. Perlunya perubahan:
	1. Diskusi tentang Politik Islam di Indonesia, baik di dalam tataran akademik maupun politik tidak pernah berkembang. Pembahasannya hampir tidak pernah berubah, stagnan dan merujuk pada kasus yang sama terus menerus. Bandingkan dengan diskusi sistem demokrasi yang sangat berkembang dan beragam. Oleh karena itu, perlu ada reformasi yang serius bagaimana politik Islam dipejarai di dalam dunia akademik
	2. Meninggalkan pendekatan kekerasan, baik kekerasan ideology maupun perilaku dalam politik. Penampakan ideology Islam dengan kekerasan hanya akan menambah antipasti masyarakat tentang keberadaan Islam. Seyogyanya pendekatan moderasi dalam politik juga diperlukan.
	3. Ijtihad politik baru yang sesuai dengan kontek sosial Indonesia. Politik moderasi.
1. Pointers disampaikan pada diskusi Kajian Diskusi Ramadhan PP Muhammadiyah, 6 Juni 2017. [↑](#footnote-ref-1)